

**JURNAL SKRIPSI**  
**REALITAS ANAK JALANAN DI KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2014**  
**( Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)**



Oleh :  
**FEDRI APRI NUGROHO**  
**K8409023**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA**  
**Januari 2014**

## **Realitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak Tahun 2014 ( Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)**

**Fedri Apri Nugroho**  
**Universitas Sebelas Maret**

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk program kegiatan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah terhadap penanganan anak jalanan di Kota Surakarta, (2) Untuk mengetahui kendala masyarakat dan pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Surakarta, (3) Untuk mengetahui persepsi anak jalanan terhadap upaya penanganan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder didapat melalui dokumentasi. Teknik pengambilan cuplikan melalui purposive sampling dan snowball sampling. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Proses analisis data menggunakan model analisis interaktif yakni tahap Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) program kegiatan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah terhadap anak jalanan antara lain penjarangan, identifikasi, home visit, pelatihan keterampilan, monitoring, bantuan pendidikan, Rumah atau asrama perlindungan, Advokasi dan Pendampingan Kasus. (2) kendala masyarakat dan pemerintah dalam penanganan anak jalanan adalah dari anak jalanan yaitu sangat dinamis atau sering berpindah-pindah, sulit mengubah mindset karena pendidikan anak jalanan rendah, rendahnya keinginan anak mengikuti program pelatihan. Dari orang tua berupa kurangnya dukungan terhadap program penanganan, tingginya tingkat eksploitasi. Dari Pemerintah belum adanya Perda terkait dengan pelarangan pemberian sesuatu kepada anak jalanan. Dari LSM kurangnya fasilitas penunjang, keterbatasan dana. (3) persepsi anak jalanan terhadap upaya penanganan oleh masyarakat dan pemerintah banyak yang memiliki kesan positif, namun juga ada kesan negatif.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah merupakan respon atas banyaknya anak yang turun ke jalan. Hal tersebut merupakan suatu tindakan sosial, yang mana tindakan tersebut berupa peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, pelatihan, pendampingan, serta perlindungan, sehingga dapat mewujudkan kedisiplinan dan kemandirian terhadap anak jalanan. Penanganan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terhadap anak jalanan dikaji melalui tindakan sosial atas dasar rasionalitas pemikiran. Perilaku ini termasuk kedalam rasionalitas Instrumental (Zwerk rational) karena penanganan anak jalanan didasarkan pada pertimbangan yang sadar dan bertujuan dengan tujuan yang mereka harapkan, serta mempertimbangkan alat yang mereka gunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Kata kunci: Realitas, Anak Jalanan, Kota Layak Anak

## **Pendahuluan**

Menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Solo, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Solo. Hal ini karena permasalahan anak di Kota Solo masih cukup tinggi dan beragam. Salah satu permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan adalah anak jalanan. Selama ini ada anggapan bahwa keberadaan anak jalanan merupakan masalah sosial yang sulit untuk dicari solusinya. Anak jalanan dianggap sebagai sampah masyarakat, yang sering menyebabkan keresahan terhadap siapa saja yang bersinggungan dengan mereka. Keresahan dari masyarakat itu karena banyak anak jalanan yang melakukan tindakan menyimpang, seperti mencuri, merampok, tawuran, minum-minuman keras, itu merupakan citra dari anak jalanan di mata masyarakat. Pada umumnya anak jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun, pada periode ini perkembangan sosial anak remaja ditandai oleh usaha anak yang ingin memisahkan diri dari orang tua untuk menentukan dirinya atau mencari identitas ego. Sudah barang tentu pembentukan identitas, yaitu perkembangan ke arah individualitas yang mantap, merupakan aspek yang penting dalam perkembangan menjadi diri sendiri. Anak jalanan akan lebih memerlukan teman sebaya untuk berinteraksi, sehingga memerlukan bimbingan dari orang-orang dewasa dan lingkungan sekitarnya. Biasanya mereka tidak hidup bersama keluarganya, sebagian besar waktunya mereka habiskan di jalanan mencari uang dan berkeliaran di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya.

Khusus dalam kasus penanganan anak jalanan, sejak tahun 2006 hingga kini di Kota Solo tercatat masih terdapat anak jalanan dalam jumlah yang cukup tinggi yakni 1200 anak. Angka tersebut sangat mengkhawatirkan apabila tidak segera dicari solusinya mengingat Kota Solo menjadi salah satu kota model percontohan pembangunan Kota Layak Anak. Peningkatan anak jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi semata, namun juga adanya disfungsi keluarga, lingkungan dan kehidupan jalanan yang memberi kebebasan hidup juga merupakan faktor pendorong pesatnya populasi anak jalanan. Hal ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sudah menjadi

rahasia umum bahwa dunia jalanan adalah dunia yang penuh kekerasan dan eksploitasi. Suasana kehidupan di jalan yang keras penuh persaingan, ancaman, eksploitasi dan tindak kekerasan sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa, moral, emosional dan sosial. Keadaan tersebut akan menyebabkan anak mengalami depresi dan kehilangan arah tujuan hidup. (Joglosemar, 20 Desember 2010)

Melihat pada latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan penelitian ini meletakkan pada : (1) Bagaimana bentuk program kegiatan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah terhadap penanganan anak jalanan di Kota Surakarta? (2) Bagaimana kendala masyarakat dan pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Surakarta? (3) Bagaimana persepsi anak jalanan terhadap upaya penanganan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Surakarta?

## **Review literatur**

### **Konsep Anak Jalanan**

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Pada realitas sehari-hari, kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi.

Menurut Suyanto (2010), “anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marjinal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat” (hlm. 185). Di berbagai sudut kota sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak

jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

### **Konsep Kota Layak Anak**

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa:

“Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kota layak anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian dengan judul realitas anak jalanan di Kota Layak Anak dilakukan di Kota Surakarta dengan pendekatan penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus digunakan untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian yaitu mengetahui penanganan anak jalanan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah.

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan diperoleh melalui pencatatan langsung dari hal yang dikemukakan informan yakni kata-kata dan tindakan juga didukung melalui foto yang digunakan sebagai bukti wawancara, serta melihat fakta langsung yang terjadi di lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Staf Dinas Sosial Kota Surakarta, Ketua L PPAP

Seroja, Manajer Sektor Informal Dan Perkotaan LSK Bina Bakat, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, orang tua anak jalanan, serta anak jalanan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan nara sumber antara lain ketua-ketua LSM yang menangani anak jalanan, staf Dinsos yang menangani anak jalanan, anak jalanan yang mengikuti penanganan di LSM, dan orang tua anak jalanan. Observasi langsung digunakan untuk mengetahui anak jalanan yang ada di lapangan obyek penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

### **Pembahasan**

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, realitas anak jalanan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak sekali pihak yang terlibat untuk menangani permasalahan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan menimbulkan kesan bahwa sebuah kota belum secara maksimal dalam menangani permasalahan sosial di daerahnya. Kehidupan perkotaan yang keras membuat kebanyakan orang harus bisa survive dalam segala kondisi. Setiap orang di kota harus bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak semua usaha yang mereka lakukan akan dibayar dengan kesuksesan, banyak juga yang masih kesulitan secara ekonomi walaupun mereka telah mengerahkan segala kemampuannya. Latar belakang keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi akan sangat rentan bagi kehidupan seorang anak. Anak belum memiliki kestabilan proses berpikir sehingga sangat mudah dipengaruhi faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Di lingkungan keluarga, orang tua sangat dominan dalam memberikan penanaman moral serta mental, karena pada lingkungan ini adalah fase dimana anak akan mengalami proses sosialisasi yang berulang-ulang sehingga akan membentuk karakter pada dirinya sendiri.

Dalam memudahkan penganalisisan penelitian ini, akan disajikan matrik tentang penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM berikut ini:

## 1. Penanganan Anak Jalanan oleh Pemerintah

Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan secara intensif dan mendalam agar bisa bersentuhan langsung dengan akar penyebab permasalahannya. Penyebab utama anak turun ke jalan pada dasarnya adalah kesulitan ekonomi, yang ada di lingkungan keluarga, walaupun ada penyebab lain seperti keretakan rumah tangga, perceraian, pengaruh teman dan lingkungan sosial setempat. Kesulitan ekonomi akan menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam lingkungan keluarga sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok menjadi tidak terpenuhi, dan anak akan mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Kesulitan ekonomi yang dialami keluarga akan menyebabkan berbagai masalah, karena akan menciptakan suasana keluarga yang tidak kondusif sehingga akhirnya kebutuhan dan hak anak tidak terpenuhi. Melihat kebutuhan mereka tidak terpenuhi maka anak akan mencari cara untuk memenuhinya, dan cara yang dipilihnya adalah turun ke jalan menjadi pengamen. Selain faktor kesulitan ekonomi penyebab anak jalanan turun ke jalan juga disebabkan keluarga yang broken home. Dari pengakuan beberapa anak jalanan mengatakan bahwa salah satu dari kedua orang tua mereka sudah tidak merawat mereka lagi, bahkan ada yang sejak kecil belum pernah melihat ayahnya sama sekali. Keadaan keluarga yang tidak lagi utuh ini tentu membuat beban dari orang tua tunggal akan semakin berat untuk membesarkan anak-anaknya. Keadaan yang demikian akan membuat anak melakukan respon terhadap stimulus yang diberikan orang tuanya, yaitu timbul keinginan untuk membantu mencari uang.

Sebelum melakukan penanganan, Dinsos membentuk Tim Kerja yang dimaksudkan untuk membantu proses penanganan anak jalanan di lapangan. Tim Kerja tersebut meliputi: Dinsosnakertrans, Kepolisian, Satpol PP, TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan). Tim kerja tersebut nantinya akan melakukan langsung tugas di lapangan yaitu untuk melakukan penjaringan. Penjaringan dilakukan di setiap pusat-pusat keramaian di Kota Surakarta yang meliputi terminal, pasar, taman taman dan perempatan lampu merah di berbagai lokasi. Sasarannya adalah PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar), anak jalanan masuk dalam

kategori orang terlantar. Dalam melakukan penjaringan ini peran Satpol PP dan Kepolisian hanya sebagai pengawal dan penjaga bila mana ada sesuatu yang tidak diinginkan ketika ada di jalan. Sedangkan petugas yang melakukan penjaringan langsung adalah dari Dinsos dibantu oleh LK3 dan TKSK.

Setelah tim kerja terbentuk Dinsos melakukan upaya selanjutnya yaitu melaksanakan langkah-langkah penanganan anak jalanan yang sudah direncanakan. Langkah-langkah penanganan yang dilakukan Dinsos yaitu: Penjaringan, Identifikasi, Home visit, Pelatihan Keterampilan.

Penjaringan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Dinsos dibantu tim kerjanya. Penjaringan langsung dilakukan di lapangan yaitu di tempat-tempat strategis dan pusat keramaian seperti pasar, terminal, taman dan perempatan jalan. Dalam pelaksanaannya penjaringan tidak dilakukan secara rutin, namun dalam satu tahun hanya dilakukan sebanyak 6 kali ada juga yang hanya 2 kali tergantung dari penganggaran dan perencanaan program di RAPBD. Anak yang terjaring kemudian dikumpulkan di suatu tempat, dan diberi makan serta sosialisasi oleh Dinsos.

Setelah dilakukan penjaringan, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap anak yang terjaring. Identifikasi tersebut adalah pendataan terhadap anak yang meliputi nama, umur, alamat, orang tua dan keterangan lain seperti masih sekolah atau tidak, penyebab turun ke jalan dsb. Proses Identifikasi ini nantinya akan diketahui dari mana anak jalanan tersebut berasal, bila dia berasal dari luar daerah maka akan langsung dipulangkan, sedangkan yang berasal dari dalam daerah akan dipulangkan melalui kelurahan yang nantinya akan dilakukan home visit. Home visit merupakan langkah yang diambil sebagai upaya mengetahui lebih dalam mengenai kondisi anak serta kondisi keluarganya. Dari home visit tersebut, nanti akan diketahui mengenai latar belakang keluarganya, kondisi perekonomian orang tuanya, penyebab anak turun ke jalan dan bila terjadi bisa ditemukan bentuk eksploitasi anak. dari keterangan-keterangan tersebut, juga akan ditinjau kembali melalui tetangga dan lingkungan masyarakat setempat agar nantinya bisa diperoleh data yang benar. Jika dalam keterangan tersebut diperoleh mengenai perekonomian orang tua anak jalanan yang benar-benar dibawah garis



kemiskinan, maka bisa juga dimasukkan ke dalam program Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang nanti akan dapat pelatihan keterampilan dan bantuan dari pemerintah.

Jika penjangkaran, identifikasi dan home visit sudah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah pelatihan keterampilan. Ini merupakan puncak dari pelaksanaan program yang melibatkan langsung anak jalanan di dalamnya melalui pemberdayaan. Pelatihan keterampilan yang dilakukan Dinsos, setiap tahun mengalami perubahan karena memang harus mengikuti inovasi dan perkembangan teknologi yang sedang berjalan. Misalnya pada tahun 2011 dan 2012 pelatihan keterampilan yang diajarkan adalah mengenai pembuatan letter dan design grafis. Dalam pelatihan letter setiap anak akan diberikan perlengkapan masing-masing berupa peralatan yang akan digunakan untuk membuat stempel, plat kendaraan, dll. Sedangkan untuk pelatihan design grafis akan dilakukan secara kelompok karena, terkendala pengadaan perangkat komputer yang begitu mahal. Setelah mengikuti pelatihan nantinya peralatan tersebut akan diberikan langsung kepada anak jalanan, sehingga nanti mereka bisa mempraktekannya dan mengembangkan usahanya. Tidak berhenti sampai disitu, Dinsos juga akan melakukan monitoring terhadap pelatihan yang sudah diberikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang kelanjutan anak jalanan itu dalam mengembangkan pelatihan yang sudah diterima.

Proses pelaksanaan program yang dilakukan Dinsos akan bekerja maksimal apabila ada pihak yang bisa menjadi mitra atau jejaring sosial dalam melakukan penanganan. Jejaring sosial disini adalah lembaga-lembaga atau instansi yang bersedia bekerja sama untuk membantu proses penanganan yang sudah dilakukan. Misalnya diketahui ada anak jalanan yang sempat putus sekolah, Dinsos bisa menggandeng Dinas Pendidikan agar bisa mengusahakan beasiswa untuk anak tersebut, lalu bila ada anak jalanan yang menderita penyakit kronis bisa dilakukan kerjasama dengan RSUD begitu seterusnya, sehingga nanti akan semakin baik dalam mengupayakan pemenuhan hak anak tersebut. Jejaring sosial itu diantaranya adalah Panti sosial anak, Dinas Pendidikan, Lembaga pendidikan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Kepolisian, Stasiun kereta

api, Terminal bus dan RSUD, RSJ, LSM, LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Weber dalam George Ritzer (1992) menjelaskan tindakan sosial atas dasar rasionalitas ke dalam empat tipe. Empat tipe rasionalitas tersebut adalah:

- a. *Zwerk rational*  
Yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *Zwerk Rational* tidak absolute. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakan itu.
- b. Rasionalitas yang berorientasi nilai (*Wrektrational action*)  
Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih cepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.
- c. Tindakan Afektif (*Affectual action*)  
Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami. Kurang atau tidak rasional.
- d. Tindakan Tradisional (*Traditional action*)  
Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu saja (Ritzer, 1992:47-48).

Berdasarkan pandangan Weber tersebut, penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk ke dalam rasionalitas instrumental (*zwerk rational*), tindakan rasionalitasnya yaitu:

- a. Penanganan dilakukan untuk menyerap anggaran

Penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah terkesan hanya sebagai alat untuk penyerapan anggaran di APBD. Dinsos hanya seperti membuat program penanganan yang mampu menyerap anggaran sebagai wujud bentuk tanggung jawab dalam tugasnya menangani permasalahan sosial. Hal ini diperkuat dari tidak adanya data yang pasti tentang jumlah anak jalanan yang ada di Kota Surakarta. TR sebagai staf Dinsos menjelaskan bahwa penanganan yang telah

dilakukan selama ini tidak bisa memetakan jumlah anak jalanan. Hal itu dikarenakan anak jalanan yang selalu bergerak dinamis, dan berpindah-pindah tempat. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemerintah tidak terlalu serius dalam menangani anak jalanan di Kota Surakarta, dan terkesan hanya melakukan penanganan seperti razia dan penjaringan sebagai tempat penyerapan anggaran.

- b. Pelatihan keterampilan yang dilakukan sebagai formalitas pertanggung-jawaban pelaksanaan program.

Setelah dilakukan penjaringan dan identifikasi, langkah selanjutnya yang dilaksanakan adalah pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan ini sendiri, diperuntukkan bagi anak jalanan yang terjaring saat identifikasi, serta bagi anak jalanan yang memiliki keinginan untuk mengikutinya. Realitas di lapangan menunjukkan rendahnya minat anak jalanan untuk mengikuti pelatihan keterampilan tersebut, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan kelurahan setempat agar bisa membujuk anak tersebut mengikuti pelatihan yang dilakukan. Pelatihan keterampilan yang dilakukan juga hanya dilaksanakan selama empat sampai lima hari, dengan waktu sesingkat itu keterampilan anak tidaklah bisa terasah dengan baik, sehingga terkesan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan hanya sebagai formalitas pertanggung-jawaban pelaksanaan program.

- c. Penanganan dilakukan untuk mengurangi jumlah anak jalanan

Bagi anak jalanan, penjaringan yang dilakukan pemerintah dianggap sebagai cara yang penuh kekerasan sehingga mereka akan berusaha lari jika dihadapkan dengan situasi tersebut. Penjaringan dan identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya menggambarkan bahwa tujuan dari penanganan itu hanyalah sebatas mengurangi jumlah anak jalanan bukan mencari solusi atas permasalahan itu sendiri.

- d. Penjaringan dan identifikasi dilakukan untuk memberi efek jera

Peran Satpol PP dan aparat kepolisian dalam melakukan penjaringan memang sangat strategis. Lembaga tersebut merupakan garda terdepan di lapangan untuk menangkap anak jalanan yang beroperasi, walaupun sebenarnya Dinsos merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab atas penanganan anak

jalanannya tersebut. Penjarangan yang dilakukan diharapkan bisa memberikan efek trauma, sehingga anak jalanan akan jera dan tidak lagi turun ke jalan.

## 2. Penanganan Anak Jalanan oleh LSM

Selain pemerintah, pihak yang turut menangani permasalahan anak jalanan adalah masyarakat yang terwujud dalam bentuk Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Keterlibatan LSM dalam menangani permasalahan anak jalanan tentu sangat membantu pihak pemerintah, karena dengan begitu akan lebih mudah diperoleh keluaran (out put) yang maksimal dari program yang banyak dijalankan. Untuk mendukung upaya pemerintah, LSM mempunyai otoritas dan hak untuk menentukan sendiri program kerja yang akan dijalankan dalam menangani permasalahan anak jalanan. Dalam merencanakan program kegiatan, LSM akan melibatkan partisipasi anak untuk berpendapat dan merancang sendiri kegiatan yang mereka inginkan. Sehingga dengan begitu anak akan merasa senang karena mereka bisa memilih sendiri kegiatan yang akan mereka ikuti. Dalam melakukan penanganan terhadap anak jalanan program kegiatan yang dilakukan LSM meliputi:

1. Bantuan Pendidikan yang meliputi pemberian beasiswa pendidikan bagi anak yang masih bersekolah di sekolah formal dan pelaksanaan pendidikan informal kesetaraan bagi anak yang putus sekolah.
2. Mengadakan pendampingan dan pemberdayaan anak jalanan.
3. Pelatihan keterampilan.
4. Rumah atau asrama perlindungan.
5. Advokasi dan pendampingan kasus.

Dalam melakukan kegiatan di LSM tersebut anak jalanan akan memperoleh fasilitas yang menunjang terlaksananya program kegiatan tersebut. Fasilitas yang diberikan sesuai dengan program kegiatan yang diikuti, jadi antara satu program dengan program lain akan ada perbedaan fasilitas. Misalnya ketika mengikuti pelatihan keterampilan masak anak akan mendapatkan alat-alatnya untuk kemudian dipraktikkan di rumahnya masing-masing. Anak yang mengikuti sekolah informal akan mendapatkan peralatan perlengkapan sekolah seperti alat

tulis, sepatu tas dan seragam. Anak yang masih sekolah di sekolah formal akan memperoleh beasiswa pendidikan dsb.

Untuk melaksanakan kegiatan operasional, LSM juga dibantu berbagai pihak untuk menyokong biaya yang dikeluarkan. Biaya itu bisa berasal dari donatur, hibah dari Pemerintah Kota, bantuan dari Dinas Sosial Provinsi, dan bantuan dari Kementerian Sosial. Aliran dana tersebut juga tidak menentu karena bantuan dan hibah itu tidak bersifat tetap, sehingga keberadaan donatur sangat berarti bagi mereka. Keuangan akan sangat menentukan kelancaran program kegiatan yang akan dijalankan, sehingga tak jarang ketika dana operasional tidak ada maka akan terjadi kendala pelaksanaan program. Kendala LSM dalam menangani anak jalanan tidak selalu berpangkal pada masalah dana, tetapi faktor sosial juga sangat berperan penting. Faktor sosial itu antara lain berasal dari anak jalanan itu sendiri, orang tuanya, juga lingkungan sosial tempat tinggalnya.

Berdasarkan pandangan Weber tentang rasionalitas tindakan sosial, penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh LSM termasuk ke dalam rasionalitas instrumental (*zwerk rational*), tindakan rasionalitasnya yaitu:

- a. Penanganan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi anak jalanan.

Pendekatan yang dilakukan LSM kepada anak jalanan adalah melalui cara yang sangat humanis. LSM mendatangi tempat-tempat yang disitu terdapat permasalahan sosial, sehingga anak jalanan yang ditangani benar-benar diketahui kondisi mereka yang sebenarnya. Salah satu informan, yaitu ML mengatakan bahwa dia mendatangi anak yang berada diperempatan jalan, di pasar agar membujuknya mengikuti kegiatan yang di LSM yang ia bina. Upaya penanganan seperti itu merupakan sebuah tindakan sosial, yang benar-benar nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi anak jalanan.

- b. Pelatihan keterampilan dilakukan untuk membekali keterampilan pada anak

Penanganan yang dilakukan terhadap anak jalanan, salah satunya adalah mengadakan pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan yang dilakukan tentu sangat memperhatikan kebutuhan anak. Munculnya bentuk pelatihan tersebut

adalah melalui proses pra kegiatan, sehingga memerlukan keterlibatan anak dalam menemukan pelatihan yang tepat. Dengan mengikuti pelatihan, indikator yang akan dicapai adalah anak bisa menguasai suatu keterampilan tertentu sehingga nanti ia bisa mengembangkannya.

c. Bantuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM anak

Bantuan pendidikan yang diadakan di LSM meliputi dua hal, yaitu bantuan pendidikan untuk anak yang masih sekolah dan bantuan pendidikan untuk anak yang sudah tidak sekolah. Bantuan pendidikan tersebut dilakukan melalui beberapa hal yang meliputi pemberian beasiswa, pengadaan taman belajar dan penyelenggaraan pendidikan informal, yang semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak jalanan.

3. Persepsi Anak Jalanan Terhadap Penanganan oleh LSM dan Pemerintah

Penanganan yang dilakukan oleh LSM dan pemerintah terhadap anak jalanan akan memiliki makna yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Pandangan mereka didasarkan atas pengalaman pribadi dalam mengikuti, ataupun terlibat dalam penanganan tersebut. Menurut Rasionalitas instrumental yang dikemukakan Weber dalam bertindak aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya, tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Anak jalanan akan memikirkan terlebih dahulu apa yang didapat dari mengikuti kegiatan penanganan tersebut. Anak jalanan akan melakukan pertimbangan dan pilihan secara sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Ada beberapa macam rasionalitas tindakan anak jalanan, terhadap penanganan yang dilakukan LSM dan pemerintah yaitu:

- a. Anak jalanan mengikuti penanganan agar bisa mendapat uang.
- b. Anak jalanan mengikuti pelatihan keterampilan agar memperoleh alatnya.
- c. Anak jalanan mengikuti program kegiatan agar mendapat bantuan.
- d. Anak jalanan mengikuti pelatihan untuk mengisi waktu luang.
- e. Anak jalanan menganggap razia sebagai momok yang harus dihindari.

Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan antara tujuan yang diharapkan LSM dan pemerintah terhadap respon dan motivasi anak jalanan mengikuti pelatihan keterampilan. Dalam mengikuti pelatihan, anak jalanan akan secara sadar berfikir mengenai untung rugi yang akan didapat, selama kegiatan tersebut tidak menguntungkan dirinya maka anak jalanan tidak akan mau mengikuti penanganan yang dijalankan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi anak jalanan dalam mengikuti penanganan yang dilakukan LSM dan pemerintah adalah tentang ada manfaat tidak yang bisa diperoleh, semakin banyak manfaatnya anak jalanan akan semakin antusias mengikuti.

### **Daftar Referensi**

- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Ritzer, G. (2002) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak